

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan dalam sebuah penelitian agar kajian dalam penelitian lebih spesifik dan agar tidak ada kesamaan dalam kajian penelitian sehingga tiap kajian penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dan memiliki perbandingan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan strategi dalam mengatasi kemiskinan dan sejenisnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eko Permana Septian pada tahun 2018 dengan judul *Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Safaruddin, Fatmawati, Burhanuddin, dan Hafiz Elfiansya pada tahun 2019 dengan judul *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Viki Setiawan Rambe pada tahun 2019 dengan judul *Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengetasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Sedang*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar pada tahun 2016 dengan judul *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strutturasi*. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zakaria Anwar dan Wahyuni pada tahun 2019 dengan judul *Miskin di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan*. Adapun penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Temuan/Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Muhammad Eko Permana Septian (2018)	Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul	Persamaan: penelitian ini dengan yang dikaji adalah sama-sama membahas kemiskinan masyarakat nelayan.

		Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di kabupaten serdang bedagai dengan pendekatan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).	Perbedaan:dalam penelitian ini strukturasi terjadi dalam setiap proses interaksi antar komponen struktur, kultur dan proses, semuanya tidak ada yang memberdayakan. Bahkan dalam praktiknya, struktur semakin mengikat masyarakat miskin ke dalam ruang-ruang kemiskinan berlapis.
2.	Safaruddin, Fatmawati, Burhanuddin, Hafiz Elfiansya (2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pada aspek hubungan organisasi dan antar organisasi terdapat komitmen dari organisasi lintas sector dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial dan Dnas Pendidikan berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial dan Bidang	Persamaan : Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang masyarakat miskin yang selama iini terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan: pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pemerintah

			<p>Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian masing-masing. Pada aspek perilaku implementor menunjukkan adanya upaya dan langkah- langkah yang dilakukan oleh implementor level bawah, yakni pendamping agar program PKH dapat berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun dibebberapa aspek lainnya, pendamping masih belum mampu mengambil suatu tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang ada dilingkup KMP. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisipasi blajar siswa dengan adanya bantuan</p>	<p>mempunyai misi untuk memberikan perhatian khusus bagi masyarakat miskin. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pemerintah dalam pengurangan angka kemiskinannya.</p>
3.	Viki Setiawan Rambe (2019)	Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>1) Gambaran umum Hasil penelitian menunjukkan, prses pelaksanaan keluarga harapan dalam upaya</p>	<p>Persamaan: penelitian ini terletak pada kemiskinan yang sangat di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sumber daya.</p>

		<p>pengetasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Sedang</p>	<p>pengetasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Target penetapan sasaran calon penerima PKH 2) Penetapan lokasi penerimaan program keluarga Harapan 3) Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4) Penyaluran bantuan 5) Pembentukan kelompok peserta program keluarga harapan 6) Verifikasi Komitmen 7) Penangguhan dan pembatalan 8) Pemutakhiran data 9) Pengaduan <p>Hasil Penelitian peserta PKH Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode individual dan kelompok, terbukti program keluarga harapan di kelurahan</p>	<p>Perbedaan: penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat nelayan sedangkan bagaimana kemiskinan pada nelayan buruh.</p>
--	--	---	--	---

			saentis Kabupaten deli serdang, dilihat dari tujuan dan fungsi Bimbingan Penyuluhan islam telah tercapai.	
4.	Aris Munandar (2016)	Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi	Hasil penelitian ini persoalan struktural kemiskinan nelayan bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terdapat di banyak negara di dunia. Terjadi pergeseran kelembagaan sistem produksi yang ada pada masyarakat nelayan, antara lain dalam hal sistem penjualan dan juga dalam hal penguasaan kelembagaan usaha yang ada. Strukturasi nelayan itu terjadi dalam setiap proses interaksi antar komponen struktur, kultur dan proses, semuanya tidak ada yang memberdayakan. Bahkan dalam praktiknya, struktur semakin mengikat masyarakat nelayan miskin ke dalam ruang-ruang kemiskinan berlapis. Dinamika relasi agen struktur yang	Persamaan: penelitian ini dengan yang dikaji adalah sama-sama membahas kemiskinan. Perbedaan: dalam penelitian ini strukturasi masyarakat miskin itu terjadi dalam setiap proses interaksi antar komponen struktur, kultur dan proses, semuanya tidak ada yang memberdayakan. Bahkan dalam praktiknya, struktur semakin mengikat masyarakat miskin ke dalam ruang-ruang kemiskinan berlapis.

			<p>berlangsung pada masyarakat nelayan secara struktur dan praktik sosial memang mengalami perubahan, khususnya, dalam posisi peran struktural yang menentukan(dominan).</p> <p>Dalam penelitian ini proses perubahan yang berlangsung didukung oleh pengabaian peran pemerintah. Perubahan penguasaan struktur dominasi tersebut tidak mengubah posisis nelayan menjadi lebih baik. Namun tetap dalam kemiskinan.</p>	
5.	Zakaria Anwar, dan Wahyuni , (2019)	Miskin di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan adalah salah satu kelompok sosial penduduk atau komunitas yang selama ini terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Masyarakat nelayan yang sumber pendapatannya berbasis perairan merupakan bagian integral dari</p>	<p>Persamaan : Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang masyarakat miskin yang selama iini terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun politik.</p> <p>Perbedaan: pada penelitian terdahulu membahas tentang</p>

		<p>bangsa ini yang dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan sumber daya sub sektor perairan dan kelautan dalam mengisi pembangunan ekonomi nusantara. Selain tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat (musim) pola kerja homogen yang bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, berbagai persoalan lain yang mendera kaum nelayan dan menjadi persoalan keterpurukan klasik. Kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan keterbatasannya daya serap industri pengolahan ikan masih terjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan. Selain dari itu kekuatan canggih armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan</p>	<p>bagaimana pemerintah mempunyai misi untuk memberikan perhatian khusus yang serius bagi masyarakat miskin. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengurangan angka kemiskinannya .</p>
--	--	--	---

			<p>hasil tangkapan serta belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka menjadi persoalan dalam daya saing para nelayan kecil dan nelayan tradisional hingga hari ini. Sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin mereka seringkali dijadikan obyek eksploitasi oleh para pemilik modal atau para tengkulak, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata.</p>
--	--	--	--

Adapun unsur kebaruan dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini dikaji dalam perspektif sosiologi dan dianalisa dengan teori tindakan sosial Max Weber. Selain itu kebaruan lainnya yang terdapat dari penelitian ini adalah perbedaan lokasi serta obyek penelitian yang digunakan, yakni Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Perbedaan lokasi penelitian akan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda pula. Seperti halnya strategi-strategi penanganan fenomena kemiskinan yang dimiliki oleh setiap lembaga akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya kebaruan penelitian, diharapkan dapat memberi kontribusi baik bagi keilmuan ataupun bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah, *stakeholder*, ataupun masyarakat.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (KBBI, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, Torang, 2014).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Nuruni dan Kustini, 2011). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan

kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan (Ulfiah, 2016).

Optimalisasi untuk membangun civil society, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

2.2.2. GEMALATASKIN

Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan yang selanjutnya disingkat GEMALATASKIN adalah program daerah dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan, GEMALATASKIN dimaksudkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.

Adapun tujuan GEMALATASKIN antara lain:

1. tersinerginya upaya pengentasan kemiskinan dengan kebijakan pengelolaan program pengentasan kemiskinan untuk menjadi satu kesatuan yang terkoordinir dan sinkron antar program OPD;
2. meningkatnya peran multi OPD;
3. mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan;
4. meningkatnya pendapatan, keberdayaan, dan ketrampilan masyarakat secara mandiri;
5. menurunnya disparitas pendapatan masyarakat (indeks gini); dan menurunnya tingkat pengangguran.

2.2.3. Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Sedangkan menurut Amartya Sen, dia menyampaikan bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami *capability deprivation* dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif.

Sementara itu, Reitsma dan Kleinpenning menjelaskan bahwa, kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material dan non material.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan kemiskinan antara lain:

1. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
4. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Gerakan Bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan

2.3. Landasan Teori

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Landasan teori secara umum adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep yang dapat membantu untuk memahami suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, teori yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berkembang atau bisa berubah setelah peneliti melangsungkan penelitiannya. Teori-teori ilmiah dalam penelitian dapat digunakan sebagai alat yang membantu proses pemecahan suatu masalah pada penelitian. Adapun teori yang akan digunakan sebagai analisa dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber.

Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau aktor yang memiliki signifikansi subjektif bagi aktor tersebut tetapi berdampak pada aktor lain dan diharapkan dapat menimbulkan respon. Menurut Weber, terdapat dua macam tindakan sosial, yakni tindakan sosial yang rasional (tindakan rasional) dan tindakan sosial non rasional (tindakan non rasional). Tindakan rasional dalam pemahaman Weber selalu berkaitan dengan pertimbangan sadar sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan. Tindakan rasional terbagi menjadi dua jenis tindakan, yakni tindakan rasional instrumental (rasionalitas instrumental) dan tindakan rasional yang berorientasi pada nilai (rasionalitas berorientasi nilai). Sedangkan

tindakan non-rasional juga dibagi atas dua, yakni tindakan tradisional dan tindakan afektif. Dengan demikian ada empat tindakan sosial yakni tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan non-rasional tradisional, dan tindakan non-rasional afektif (Raho, 2021).

Penjelasan lebih lanjut tentang keempat tindakan sosial itu adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional telah diperhitungkan oleh aktor yang bersangkutan. Di dalam tindakan ini aktor telah mendefinisikan apa akan dicapai melalui tindakan tersebut dan apa instrument atau alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, tindakan rasional yang berorientasi nilai. Tindakan jenis ini berkaitan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai. Dalam tindakan ini, orang melakukan sesuatu karena percaya pada nilai-nilai tertentu. Ketiga, tindakan non-rasional yang bersifat tradisional. Dalam tindakan non-rasional yang bersifat tradisional, orang melakukan sesuatu hanya karena kebiasaan atau sudah terwarisi dalam tradisi. Pertimbangan utamanya adalah kebiasaan atau tradisi walaupun tindakan tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis atau tidak menguntungkan. Seorang individu melakukan sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya. Keempat, tindakan non-rasional afektif. Tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau afeksi tanpa terlalu banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional (Op.Cit. 2021).

Teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber tersebut berorientasi pada motif dan tujuan dari pelaku atau aktor. Dengan menggunakan teori tersebut, motif dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan sosial yang dilakukan dapat dianalisa. Dengan memahami motif dan tujuan tersebut, sekelompok manusia akan saling menghargai dan memahami alasan-alasan para aktor tindakan sosial dalam melaksanakan tindakannya. Bagi Weber, rasionalitas berarti pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sebelum orang melakukan sesuatu. Pertimbangan-pertimbangan itu menyangkut tujuan sebuah tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu (rasional instrumental). Weber melihat bahwa birokrasi adalah contoh dari rasionalitas. Dalam sistem birokrasi orang mencari cara-cara yang rasional untuk mencapai sebuah tujuan.

Jika dianalisa menggunakan teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dapat dianggap sebagai aktor yang dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial memiliki peran dan potensi untuk mengurangi angka kemiskinan melalui strategi atau upaya-

upaya yang mereka lakukan. Melalui strategi yang dimiliki Dinas Sosial untuk mengatasi kemiskinan, maka diharapkan upaya yang dilakukan dapat mempengaruhi dan diikuti oleh masyarakat. Sehingga melalui tindakan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial diharapkan dapat mengatasi kemiskinan

